

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Konsep Evaluasi Program dan Model-model Evaluasi

1. Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk melihat tingkat ketercapaian suatu kegiatan. Tingkat ketercapaian dilihat dari kesesuaian hasil akhir dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *Evaluation* yang dapat diartikan sebagai penilaian.

Arikunto dan Jabar mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.¹

Evaluasi menurut Gay adalah sebuah proses sistematis pengumpulan dan penganalisisan data untuk pengambilan keputusan.²

¹ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.2.

² Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.8.

Di awal pengembangan bidang ini, Scriven mendefinisikan “*judging the worth or merit of something*”³ atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti memutuskan nilai atau arti dari sesuatu.

Djaali menyatakan bahwa evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.⁴

Menurut Stufflebeam, secara operasional evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, pelaporan, dan menerapkan informasi deskriptif dan menghakimi tentang manfaat beberapa objek dan layak untuk memandu pengambilan keputusan, dukungan akuntabilitas, menyebarkan praktik yang efektif, dan meningkatkan pemahaman tentang terlibat fenomena.⁵

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, evaluasi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan pengumpulan dan analisis data secara sistematis berdasarkan kriteria atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya yang terdiri dari rangkaian tahapan yang bertujuan untuk menilai manfaat dari bekerjanya sesuatu, yang kemudian diolah menjadi sebuah informasi deskriptif untuk menjadi

³ Jody L. Fitzpatrick, James R. Sanders dan Blaine R. Worthem, *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*, (New Jersey: Pearson, 2012), h.7.

⁴ Djaali dan Puji Mulyono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), h.1.

⁵ Daniel L. Stufflebeam dkk, *Evaluation Models*, (New York: Kluwer Academic Publishers, 2002), h. 280.

bahan pertimbangan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

2. Program

Menurut Herman sebagaimana dikutip oleh Tayibnapis, program ialah segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.⁶

Arikunto menyatakan ada dua pengertian dari program, yakni secara umum dan khusus.

Secara umum program dapat diartikan sebagai rencana, seperti rencana seseorang setelah lulus ujian, apakah kemudian bekerja atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Secara khusus program yang dikaitkan dengan evaluasi, didefinisikan Arikunto sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung secara berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.⁷

Pengertian program yang lain menurut pengelola trias teknodik *“as an educational activities that are provided on a continuing based.”*⁸ Artinya, program merupakan kegiatan pendidikan yang disediakan rutin.

Definisi lain dari program menurut Sukardi, program merupakan salah satu hasil kebijakan yang penetapannya melalui

⁶ Farida Y Tayibnapis, *Evaluasi Program*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.9.

⁷ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Loc.Cit.*

⁸ Sukardi, *Op. Cit.* h.4.

proses panjang dan disepakati oleh para pengelola untuk dilaksanakan baik oleh sivitas akademika maupun tenaga administrasi lembaga diklat.⁹

Apabila program ini langsung dikaitkan dengan evaluasi program, Arikunto dan Jabar mendefinisikan,

Program sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.¹⁰

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar, dapat disimpulkan bahwa program adalah unit atau kesatuan kegiatan yang didesain sesuai dengan tujuan yang merupakan implementasi dari suatu kebijakan yang diharapkan dapat mendatangkan hasil dan pengaruh.

3. Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan evaluasi yang berkaitan erat dengan suatu program atau kegiatan pendidikan, termasuk di antaranya tentang kurikulum, sumber daya manusia, penyelenggara program, proyek penelitian dalam suatu lembaga.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Loc.Cit.*

¹¹ Sukardi, *Op. Cit.* h.3.

Evaluasi program menurut Sukardi adalah suatu proses mengumpulkan dan menganalisis data sehingga menjadi satu kegiatan luas dan komprehensif yang digunakan untuk mengambil keputusan penting terkait dengan program atau proyek yang dinilai.¹²

Hal ini sesuai dengan anjuran Spaulding yang mengatakan: "*Program evaluation is conducted for decision making purpose*".¹³ Artinya, evaluasi program dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Langbein bahwa

*Program evaluation is the application of empirical social science methods to the process of judging the effectiveness of public policies, program, or projects as well as their management and implementation for decision-making purposes.*¹⁴

Evaluasi program adalah metode empiris ilmu sosial untuk proses menilai efektivitas kebijakan publik, program, atau proyek serta manajemen dan implementasi, untuk tujuan pengambilan keputusan.

Sementara itu, menurut David dan Hawthorn, evaluasi program bisa dipandang "*as a structured process that creates and synthesizes information intended to reduce uncertainty for stakeholders about a*

¹² *Ibid.* h.4.

¹³ *Ibid.* h.3.

¹⁴ Laura Langbein, *Public Program Evaluation a Statistical Guide*, (New York: M.E. Sharpe, 2003), h.3.

given program or policy".¹⁵ Artinya, evaluasi program sebagai proses terstruktur yang menciptakan dan menyatukan informasi bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian para pemangku kepentingan tentang program dan kebijakan yang ditentukan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang terstruktur berupa kegiatan-kegiatan menilai efektivitas kebijakan publik atau program secara luas dan komprehensif untuk menciptakan informasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan.

4. Model-Model Evaluasi

a. Model Evaluasi Stake atau Model Evaluasi *Countenance*

Stake, analisis proses evaluasi yang dikemukakannya membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini dan meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi ialah *descriptions* dan *judgement* dan membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan, yaitu:

¹⁵ Sukardi, *Loc. Cit.*

Antecedents (context), Transaction (Process) dan outcomes (Output).

Matrix Description menunjukkan *Intents (Goals)* dan *Observations (Effects)* atau yang sebenarnya terjadi. *Judgements* mempunyai dua aspek, yaitu *Standard* dan *Judgement*.

Stake mengatakan bahwa apabila kita menilai suatu program pendidikan kita, melakukan perbandingan yang relatif antara satu program dengan yang lain, atau perbandingan yang absolut (satu program dengan *standard*).

Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini ialah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake mengatakan bahwa *description* di satu pihak berbeda dengan *judgement* atau menilai. Dalam model ini *antecedents* (masukan), *transaction* (proses), dan *outcomes* (hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut, untuk menilai manfaat program. Stake mengatakan bahwa tak ada penelitian dapat diandalkan apabila tidak dinilai.¹⁶

b. Model Evaluasi UCLA

¹⁶ Farida Y Tayibnapis, *Op.Cit.* h. 21.

Alkin menulis tentang kerangka kerja evaluasi yang hampir sama dengan model *CIPP*. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Ia mengemukakan lima macam evaluasi, yakni:

- 1) *System assessment*, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.
- 2) *Program planning*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
- 3) *Program implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan?
- 4) *Program improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga?
- 5) *Program certification*, yang memberi informasi tentang nilai atau kegunaan program.¹⁷

c. Model Evaluasi *Goal Oriented*

Model Evaluasi *Goal Oriented* ini merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus mengecek seberapa jauh tujuan

¹⁷ *Ibid.* h.9.

tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Model ini dikembangkan oleh Tyler.¹⁸

Kelebihan pendekatan yang berorientasi pada tujuan ini ialah terletak pada hubungan antara tujuan dan kegiatan dan penekanan pada elemen yang penting dalam program yang melibatkan individu pada elemen khusus bagi mereka. Namun keterbatasan pendekatan ini yaitu kemungkinan evaluasi ini melewati konsekuensi yang tak diharapkan akan terjadi.¹⁹

d. Model Evaluasi *Goal Free*

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Scriven ini dapat dikatakan berlawanan dengan model pertama yang dikembangkan oleh Tyler. Jika dalam model yang dikembangkan oleh Tyler, evaluator terus-menerus memantau tujuan, yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah dapat dicapai, dalam model goal free evaluation (evaluasi lepas dari tujuan) justru menoleh dari tujuan. Menurut Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program evaluator tidak perlu memerhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan

¹⁸ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Loc.Cit.*

¹⁹ Farida Y Tayibnapis, *Op.Cit.* h.25.

yang terjadi baik hal-hal positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang sebetulnya memang tidak diharapkan).

Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi evaluator lupa memerhatikan seberapa jauh masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umum maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak manfaatnya.

Dari uraian ini jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "evaluasi lepas dari tujuan" dalam model ini bukannya lepas sama sekali dari tujuan, tetapi hanya lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci per komponen.²⁰

e. Model Evaluasi Formatif-Sumatif

Selain model "evaluasi lepas dari tujuan", Scriven juga mengembangkan model lain, yaitu model formatif-sumatif. Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan

²⁰ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Op.cit.*, h. 41.

(disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif).

Berbeda dengan model yang pertama dikembangkan, model yang kedua ini ketika melaksanakan evaluasi evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Dengan demikian, model yang dikemukakan oleh Michael Scriven ini menunjuk tentang "apa, kapan, dan tujuan" evaluasi tersebut dilaksanakan.

Para evaluator pendidikan, termasuk guru-guru yang mempunyai tugas evaluasi tentu sudah mengenal dengan baik apa yang dimaksud dengan evaluasi formatif dan sumatif. Hampir setiap bulan guru-guru melaksanakan evaluasi formatif dalam bentuk ulangan harian. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk mengetahui sampai seberapa tinggi tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan untuk masing-masing pokok bahasan. Dikarenakan luas atau sempitnya materi yang tercakup di dalam pokok bahasan setiap mata pelajaran tidak sama maka tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan evaluasi formatif dilaksanakan dan berapa kali untuk masing-masing mata pelajaran.

Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program.

Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Mengingat bahwa objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan sumatif maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda.²¹

f. Model Evaluasi *CIPP*

Sesuai dengan huruf di akronim *CIPP*, konsep inti model ini adalah konteks, input, proses, dan evaluasi produk. Evaluasi konteks menilai kebutuhan, masalah, dan kesempatan sebagai

²¹ *Ibid.* h.42.

basis untuk mendefinisikan tujuan dan prioritas dan menilai signifikansi hasil. Evaluasi masukan menilai pendekatan alternatif untuk memenuhi kebutuhan sebagai sarana perencanaan program dan pengalokasian sumber daya. Evaluasi proses menilai pelaksanaan rencana untuk membimbing kegiatan dan kemudian untuk membantu menjelaskan hasil. Evaluasi produk mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan untuk membantu menjaga proses di jalur dan menentukan efektivitas. Dengan menggunakan empat jenis yang saling terkait ini, pengambil kebijakan, staf program dan proyek, dan penyedia layanan individu dapat mengadakan atau membuat kontrak evaluasi untuk membantu memulai, mengembangkan, dan menginstal program yang dapat diandalkan, proyek, atau layanan lainnya; untuk memperkuat program atau layanan yang ada; untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas pengawasan kelompok, sponsor, dan konstituen; untuk menyebarkan praktek-praktek yang efektif; dan untuk berkontribusi untuk pengetahuan di bidang pelayanan. Evaluasi mengikuti Model *CIPP* juga membantu kelompok eksternal; organisasi pendanaan, orang yang menerima atau mempertimbangkan untuk menggunakan jasa yang disponsori, kelompok pembuat kebijakan dan spesialis program di luar program yang sedang dievaluasi, dan pihak lain, untuk

memahami dan menilai prestasi dan nilai program, proyek, atau layanan lainnya.

Model ini ditujukan untuk penggunaan penyedia layanan, seperti papan kebijakan, staf program dan proyek, direksi dari berbagai layanan, pejabat akreditasi, pengawas distrik sekolah, kepala sekolah, guru, perguruan tinggi dan universitas administrator, dokter, pemimpin militer, dan spesialis evaluasi. Model dikonfigurasi untuk digunakan dalam evaluasi internal yang dilakukan oleh organisasi, evaluasi diri yang dilakukan oleh penyedia layanan individual, dan dikontrak evaluasi eksternal.²²

B. Konsep Program Mahasiswa Wirausaha di Universitas Negeri Jakarta

1. Relevansi Pendidikan

Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat.²³ Relevansi pendidikan berkaitan dengan kesesuaian kualitas dan kuantitas antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan harapan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja.

²² Daniel L. Stufflebeam dkk, *Loc.Cit.*

²³ Syarif Hidayat, *Teori dan Prinsip Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2013), h.22.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional disusunlah kurikulum yang memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.²⁴

Masalah relevansi pendidikan menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diatasi. Di pendidikan tinggi, masalah relevansi pendidikan menjadi tantangan yang cukup serius. Melihat banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menjadi pengangguran, perguruan tinggi seharusnya berbenah mulai dari kurikulum yang digunakan hingga ke sistem pendidikan yang diterapkan secara keseluruhan.

2. Kewirausahaan

Kao mendefinisikan entrepreneurship sebagai berikut:

*Entrepreneurship is the attempt to create value through recognition of business opportunity, the management of risk-taking appropriate to the opportunity, and through the communicative and management skills to mobilize human, financial, and material resources necessary to bring a project to fruition.*²⁵

²⁴ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: PT RIneka Cipta, 2011), h.132.

²⁵ Leonardus Saiman, *Kewirausahaan Teori Praktik dan Kasus Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 41.

Dengan kata lain, berkewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan risiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi manajemen untuk memobilisasi manusia, uang, dan bahan-bahan baku atau sumber daya lain yang diperlukan untuk menghasilkan proyek supaya terlaksana dengan baik.

Pengertian kewirausahaan menurut Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1995: "kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar."²⁶

Rye merumuskan karakteristik sukses bagi seorang wirausahawan sebagaimana Tabel 2.1 berikut.²⁷

Tabel 2.1

Karakteristik Sukses Seorang Wirausahawan

Karakteristik Sukses	Ciri Sukses yang Menonjol
Pengendalian diri	Mereka ingin dapat mengendalikan semua usaha yang mereka lakukan
Mengusahakan terselesaikannya	Mereka menyukai aktivitas yang

²⁶ Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1995

²⁷ Leonardus Saiman, *Op.Cit.* h.53.

Karakteristik Sukses	Ciri Sukses yang Menonjol
urusan	menunjukkan kemajuan yang berorientasi pada tujuan
Mengarahkan diri sendiri	Mereka memotivasi diri sendiri dengan suatu hasrat yang tinggi untuk berhasil
Mengelola dengan sasaran	Mereka cepat memahami rincian tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran
Penganalisis kesempatan	Mereka akan menganalisis semua pilihan untuk memastikan kesuksesannya dan meminimalkan risiko
Pengendali pribadi	Mereka mengenali pentingnya kehidupan pribadi terhadap hidup bisnisnya
Pemikir kreatif	Mereka akan selalu mencari cara yang lebih baik dalam melakukan suatu usaha
Pemecah masalah	Mereka akan selalu melihat pilihan-pilihan untuk memecahkan setiap masalah yang menghadang
Pemikir objektif	Mereka tidak takut untuk mengakui jika melakukan kekeliruan

3. Pengertian Program Mahasiswa Wirausaha

Meningkatnya jumlah pengangguran tamatan perguruan tinggi tiap tahunnya menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan mahasiswa tentang kondisi masa depannya yang belum menentu. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran tamatan perguruan tinggi adalah pola pikir (*mindset*) kebanyakan lulusannya untuk menjadi pencari kerja (*job seeker*) di

tengah keterbatasan jumlah lapangan kerja yang ada. Perguruan tinggi harus mengevaluasi sistem pendidikan yang selama ini diterapkan karena dengan sistem yang ada tamatan perguruan tinggi menyumbang angka pengangguran yang cukup besar. Perguruan tinggi harus menciptakan sistem pendidikan yang diperbaharui yang relevan dengan tuntutan zaman khususnya terkait ketenagakerjaan.

Dengan kondisi demikian, sejak tahun 2009 Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) untuk dilaksanakan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Program tersebut dilaksanakan di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan di beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) hasil diseleksi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dengan alokasi dana yang berbeda-beda. Dengan adanya program ini diharapkan Perguruan Tinggi dapat membuka jalan bagi penyesuaian kurikulum yang dapat merespon tuntutan dunia usaha.

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan salah satu program dalam sistem pembelajaran/pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Dengan demikian, PMW harus terintegrasi dan disinergikan dengan program-program kewirausahaan yang telah ada seperti; Kuliah Kewirausahaan, Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), Program Magang/Belajar Bekerja

Terpadu/Co-op, Kuliah Kerja Usaha (KKU) dan program kewirausahaan lainnya.²⁸

4. Tujuan dan Manfaat Program Mahasiswa Wirausaha

Program Mahasiswa Wirausaha diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) berbasis ipteks kepada para mahasiswa agar dapat mengubah pola pikir (*mindset*) dari pencari kerja (*job seeker*) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*) serta menjadi calon/pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global.

Adapun tujuan umum dari pelaksanaan Program Mahasiswa Wirausaha antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Membangun *softskill* atau karakter wirausaha;
- b. Menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi dan memiliki pola pikir pencipta lapangan kerja;
- c. Mendorong pertumbuhan, perkembangan atau terbentuknya kelembagaan (unit/pusat) pengelola program kewirausahaan di perguruan tinggi.
- d. Mendorong terbentuknya model pendidikan atau pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi.

Selanjutnya, manfaat dilaksanakannya Program Mahasiswa Wirausaha adalah sebagai berikut:

²⁸ Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha 2015 (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan), h.1.

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan *soft skill*;
 - 2) memperoleh kesempatan terlibat secara langsung dalam kegiatan bisnis;
 - 3) menumbuhkan jiwa bisnis (*sense of business*) sehingga memiliki keberanian untuk memulai dan mengembangkan usaha didukung dengan modal yang diberikan dan pendampingan secara terpadu.
- b. Bagi Usaha Kecil/Menengah (UK/M)
 - 1) mempererat hubungan antara UKM dengan dunia kampus; dan
 - 2) memberikan akses terhadap informasi dan teknologi yang dimiliki perguruan tinggi.
- c. Bagi Perguruan Tinggi
 - 1) meningkatkan kemampuan perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan;
 - 2) mempererat hubungan antara dunia akademis dan dunia usaha, khususnya UKM;
 - 3) membuka jalan bagi penyesuaian kurikulum yang dapat merespon tuntutan dunia usaha; dan
 - 4) menghasilkan wirausaha-wirausaha muda pencipta lapangan kerja dan calon pengusaha sukses masa depan.²⁹

5. Sasaran dan Besaran Modal Usaha Program Mahasiswa

Wirausaha

Sasaran dari program ini adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa S1 Universitas / Institut / Sekolah Tinggi dan diploma/politeknik yang telah menyelesaikan kuliah 2 semester atau minimal telah menyelesaikan 36 SKS.
- b. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat di atas diharapkan menempuh

²⁹ *Ibid.* h.5.

- c. seleksi yang meliputi aspek minat, motivasi berwirausaha, kelayakan usaha dan *soft skills*. Seleksi dilakukan oleh tim profesional yang terdiri dari unsur perguruan tinggi, pengusaha, dan perbankan. Keterlibatan pihak-pihak tersebut penting mengingat mahasiswa harus didampingi oleh mentor dari perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam proses pendidikan kewirausahaan, sedangkan UKM merupakan tempat magang dan yang mempunyai pengalaman praktis berusaha, dan perbankan merupakan pihak yang terkait serta berpengalaman dalam hal kelayakan finansial.
- d. Mahasiswa bersedia mengikuti peraturan dan tata tertib pengelola program PMW dengan mengikuti seluruh tahapan yang dijadwalkan, kemudian setelah menerima bantuan dana secara regular memberikan laporan pertanggungjawaban perkembangan usahanya kepada pengelola.³⁰

Dalam menjalankan usahanya, mahasiswa pemenang hibah PMW akan diberikan modal usaha. Modal usaha yang diberikan diatur dalam Pedoman PMW. Ketentuan tentang modal usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan modal usaha sebesar maksimum Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah/mahasiswa) dan maksimum Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah/kelompok terdiri atas 5 mahasiswa) yang akan dipergunakan untuk modal usaha awal (start-up) para mahasiswa
- 2) Setiap peserta hanya diperbolehkan menerima modal usaha sebanyak 1 (satu) kali. Penambahan modal pada tahun berikutnya dimungkinkan apabila terdapat rencana bisnis yang diusulkan oleh peserta/mahasiswa yang berbeda yang diajukan untuk pengembangan bisnis yang telah ada/berjalan.
- 3) Setiap perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk mengelola dana modal usaha tersebut secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Dana yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat pinjaman bergulir yang diatur sesuai ketentuan perguruan tinggi. Pengelola harus membuat

³⁰ *Ibid.* h.7.

instrumen yang dapat menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan dana.

Skema bergulir memerlukan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme perguliran, jumlah dana yang harus dikembalikan, rekening penampung, penggunaan dana, sanksi yang diberikan apabila tidak mengembalikan, metode penetapan sasaran penerima selanjutnya yang semuanya dituangkan dalam surat keputusan pimpinan perguruan tinggi. Oleh karena program ini dirancang untuk membekali para mahasiswa memiliki sikap mental wirausaha, maka segala aktivitas yang dilakukan oleh para mahasiswa peserta program harus akuntabel dan sejalan dengan semangat wirausaha.

- 4) Untuk menunjang keberlanjutan program dan modal kerja yang telah diberikan, maka setiap bulan mahasiswa wajib melaporkan kegiatan usahanya secara singkat yang meliputi penggunaan dana, proses produksi dan atau hasil penjualan. Kemudian pada bulan ke-5 mahasiswa peserta program melaporkan perkembangan usahanya secara lebih terperinci kepada perguruan tinggi pengelola program. Pada bulan November atau Desember dapat dilakukan pameran bersama semua mahasiswa PMW tahun berjalan dan juga peserta PMW sebelumnya di universitas sebagai satu kegiatan ekspose usaha mahasiswa perguruan tinggi, yang dapat menjadi acuan untuk keberhasilan di tingkat nasional.³¹

6. Mekanisme Pelaksanaan Program Mahasiswa Wirausaha

Program Mahasiswa Wirausaha dilaksanakan dalam beberapa tahapan dan memiliki sebuah mekanisme pelaksanaan. Adapun mekanisme pelaksanaan Program Mahasiswa Wirausaha adalah sebagai berikut:

- 1) Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), pada tahap pertama, perguruan tinggi pelaksana program melakukan sosialisasi

³¹ *Ibid.* h.16.

- kepada para mahasiswa, identifikasi dan seleksi mahasiswa, pembekalan kewirausahaan, penyusunan rencana bisnis sambil magang di sebuah UKM. Mahasiswa yang pernah mengikuti program magang kewirausahaan (Program Co-op, KCU, dan program kewirausahaan lain) atau telah menjalankan usaha dapat dibebaskan dari kewajiban magang.
- 2) Pada tahap kedua, untuk mendapatkan dukungan permodalan dalam rangka pendirian usaha baru (business start-up) mahasiswa harus menyusun rencana bisnis yang layak. Kelayakan rencana bisnis ditentukan oleh tim seleksi yang dapat terdiri dari unsur perbankan, UKM, dan perguruan tinggi pelaksana.
 - 3) Selama program berjalan perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan para pengusaha kecil, menengah dan besar baik yang berbadan hukum, perseorangan, koperasi atau Perseroan Terbatas, secara individu ataupun asosiasi/perhimpunan pengusaha. Pengusaha dilibatkan secara aktif untuk memberikan bimbingan praktis wirausaha, mulai dari pendidikan dan pelatihan, magang, penyusunan rencana bisnis, dan pendampingan terpadu. Harus dihindari terjadinya persaingan yang tidak sehat antarmahasiswa dan pendamping. Diperlukan terjadinya sinergi atau komplementaritas antara jenis usaha yang dikembangkan mahasiswa tersebut dan jenis usaha pendamping.
 - 4) Kopertis Wilayah melakukan tahap pertama dengan melakukan lokakarya/sosialisasi PMW kepada PTS di lingkungannya untuk mengusulkan rencana/proposal bisnis mahasiswa.
 - 5) Proses atau tahapan sosialisasi, magang sampai dengan penulisan rencana bisnis oleh mahasiswa di internal PTS dilakukan secara swadaya/swadana. PTS masing-masing (terkait dengan kegiatan ini Ditjen Dikti menyediakan hibah kompetisi/program Co-op untuk magang di UMKM bagi PTS yang berminat).
 - 6) Kopertis melakukan seleksi rencana bisnis secara terpusat di Kopertis Wilayah. PTS yang terpilih rencana bisnisnya mendapatkan dana hibah langsung melalui kontrak dengan Kopertis Wilayah sesuai DIPA.
 - 7) Pendirian usaha baru dapat dilakukan secara perorangan (individu) atau secara berkelompok. Jumlah modal usaha yang disediakan untuk pendirian usaha maksimal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per mahasiswa. Apabila berkelompok maka jumlah anggota maksimal 5 (lima) orang dengan jumlah

- modal usaha maksimal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 8) Modal usaha juga dimungkinkan untuk pengembangan usaha yang sedang berjalan dengan pengaturan khusus oleh perguruan tinggi.
 - 9) Pelaksanaan pendampingan usaha dilakukan dengan kerja sama antara perguruan tinggi dan pengusaha secara individu ataupun asosiasi sehingga usaha mahasiswa dapat berkembang dengan baik.
 - 10) Untuk Kopertis program pendampingan usaha dapat diserahkan ke PTS masing-masing dan atau berkoordinasi dengan Kopertis. Kopertis harus melakukan pemantauan pelaksanaan untuk memastikan bahwa program telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.
 - 11) Hasil akhir yang diharapkan adalah
 - a) terbentuk dan berkembangnya jiwa wirausaha dan wirausaha wirausahawan baru yang berpendidikan tinggi dan memiliki pola pikir pencipta lapangan kerja;
 - b) terbentuknya model pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi; serta
 - c) tumbuh dan berkembangnya kelembagaan pengelola kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi.³²

7. Pelaporan Program Mahasiswa Wirausaha

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Mahasiswa Wirausaha, tim pelaksana memiliki kewajiban untuk membuat sebuah laporan pelaksanaan program yang akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Laporan pelaksanaan PMW, seperti yang tertulis dalam pedoman PMW, bertujuan untuk mengetahui :

³² *Ibid.* h.6.

- 1) Kinerja Pelaksanaan PMW
- 2) Tingkat kesiapan dan kemampuan Perguruan Tinggi pelaksana dalam implementasi program;
- 3) Model / pola pelaksanaan PMW di setiap Perguruan Tinggi; dan
- 4) Umpan balik (*feed back*) pelaksanaan PMW oleh Pimpinan perguruan tinggi, tim pelaksana PMW, mentor, mahasiswa dan pengusaha, khususnya UKM.

Laporan yang dibuat oleh tim pelaksana PMW terdiri atas dua laporan sesuai dengan waktu pelaksanaannya, yaitu: (1) laporan kemajuan, dan (2) laporan akhir. Laporan Kemajuan menjelaskan perkembangan kinerja dan kegiatan semester pertama tahun berjalan. Laporan Akhir menjelaskan tingkat keberhasilan secara menyeluruh sampai akhir tahun pelaksanaan program.³³

C. Model Evaluasi Program Yang Dipilih

Evaluasi memiliki banyak model yang penggunaan tiap modelnya bergantung pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, obyek yang akan diteliti adalah Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) di Universitas Negeri Jakarta yang merupakan sebuah program yang memiliki pedoman pelaksanaan yang luas dan komprehensif yang berisikan analisis kebutuhan, tujuan pelaksanaan, rincian tahapan pelaksanaan dan indikator keberhasilan yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang rinci dalam kurun waktu pelaksanaan yang cukup panjang serta

³³ *Ibid.* h.20.

melibatkan banyak pemangku kepentingan. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap obyek penelitian, maka model evaluasi yang tepat untuk digunakan adalah model evaluasi *CIPP*. Model evaluasi *CIPP* banyak digunakan oleh evaluator dalam mengevaluasi kebijakan publik atau program karena model ini mengevaluasi secara rinci tiap komponen dari program yang meliputi konteks program, masukan program, proses pelaksanaan program dan produk akhir program. Dalam penelitian ini aspek yang dievaluasi sesuai dengan model yang digunakan, yaitu:

1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Sasaran pertama yang akan dievaluasi adalah sasaran konteks. Evaluasi konteks merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum dipenuhi, karakteristik populasi dan sampel dan individu yang dilayani dan tujuan program.³⁴ Dalam tahap ini evaluasi digunakan untuk menilai kebutuhan yang menjadi dasar atas pelaksanaan PMW.

Konteks program yang dievaluasi dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Latar Belakang PMW
- b. Tujuan PMW

³⁴ Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.181..

- c. Analisis Kebutuhan PMW

2. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Evaluasi Input (*Input Evaluation*), membantu mengatur keputusan menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.³⁵ Dalam tahap ini evaluasi masukan dilakukan untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam membantu pelaksanaan program.

Dalam penelitian ini, masukan program yang dievaluasi adalah:

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Alokasi Anggaran PMW
- c. Sasaran PMW
- d. Sarana dan Prasarana Pendukung PMW

3. Evaluasi Proses (*Process*)

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.³⁶ Pada tahap ini, evaluasi digunakan untuk

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan program merujuk pada perencanaan yang telah dibuat. Evaluasi proses adalah bagian vital dalam evaluasi program karena pelaksanaan menjadi cerminan keberhasilan suatu program.

Proses program yang dievaluasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan PMW
- b. Pembekalan PMW
- c. Menjalankan Usaha PMW
- d. Pemantauan dan Evaluasi PMW

4. Evaluasi Produk (*Product*)

Persiapan pelaksanaan program selalu diawali dengan penetapan tujuan. Tujuan program menjadi standar penilaian dan indikator keberhasilan dari sebuah program. Jika tujuan program yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka program yang dilaksanakan dinyatakan berhasil. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program ditinjau dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, digunakan evaluasi produk. Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan

untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.³⁷

Dengan menggunakan evaluasi produk, evaluator dapat mengetahui dan menilai pertanggung jawaban dari tim pelaksana Program Mahasiswa Wirausaha dalam bentuk laporan-laporan. Data yang ada dalam laporan akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran untuk program ini. Dalam penelitian ini produk program yang dievaluasi yaitu:

- a. Hasil PMW
- b. Pelaporan PMW

D. Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan landasan penelitian adalah:

1. Hasil penelitian Sativana, Putu Desta dkk, yang berjudul: **Tingkat Keberhasilan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Di Undiksha Ditinjau Dari Aspek Unit Bisnis Tahun 2012.** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) tingkat keberhasilan PMW di Undiksha ditinjau dari aspek unit bisnis tahun 2012 secara keseluruhan memiliki pesentase sebesar 35% termasuk dalam

³⁷ *Ibid.*

kategori tidak berhasil, (2) masalah yang dihadapi mahasiswa PMW dalam menjalankan unit bisnis tahun 2012 yaitu arus kas tidak lancar, sulit mengkoordinasi antar anggota PMW dalam mengelola usaha, omset tidak memenuhi target, modal tidak mencukupi, persediaan barang tidak stabil, dan (3) cara mengatasi masalah yang dihadapi mahasiswa PMW tahun 2012 yaitu menawarkan harga produk yang lebih terjangkau, bekerjasama dengan partner, membentuk sistem kerja yang efektif, mempekerjakan karyawan, meningkatkan intensitas promosi, menghimpun modal dari modal pribadi atau pinjaman rekan kerja, dan menyesuaikan persediaan barang dengan permintaan konsumen.³⁸

2. Hasil penelitian evaluatif Andi Taufiq Yusuf, yang berjudul: **Evaluasi Program Mahasiswa Wirausaha Di Universitas Hasanuddin Tahun 2012**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika merujuk pada keseluruhan indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh Dikti, maka terlihat bahwa tingkat pencapaiannya sangat rendah dan dapat dikatakan bahwa program ini tidak berhasil. Ada 4 hal strategis yang dianggap perlu diperhatikan berkenaan dengan hal tersebut, yakni: (1) model seleksi peserta

³⁸ Hasil penelitian Sativana, Putu Desta dkk <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/download/3089/2563>, diakses pada tanggal 12 November 2016 pukul 09.20 WIB

penerima modal PMW, (2) model pembinaan kewirausahaan kepada peserta: diperlukan perbaikan bahkan perubahan drastis model PMW agar pembinaan terhadap kedua hal tersebut (karakter dan pengalaman) dapat dijalankan, (3) eksistensi lembaga kewirausahaan: dibutuhkan lembaga kewirausahaan khusus yang didirikan untuk pembinaan jangka menengah-panjang, (4) efektifitas dan efisiensi dana PMW: untuk PMW tahun 2009 saja telah digelontorkan dana sebesar 1 Milyar dan hanya 2 usaha yang mampu bertahan sampai saat ini.³⁹

3. Hasil penelitian Afsaneh Bagheri dan Zaidatol Akmaliah, yang berjudul: **Role of University Entrepreneurship Programs in Developing Students' Entrepreneurial Leadership Competencies: Perspectives From Malaysian Undergraduate Students**. Hasil penelitian menunjukkan ada 16 peran program pendidikan kewirausahaan universitas dalam mengembangkan kompetensi kepemimpinan kewirausahaan yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok; peran terkait mahasiswa dan peran terkait program. Peran terkait mahasiswa mencerminkan kontribusi dari program dalam mengembangkan kompetensi kepemimpinan

³⁹ Hasil penelitian Andi Taufiq Yusuf
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2086/Andi%20Taufiq%20Yusuf%20E211%2008%20264.pdf;sequence=1>, diakses pada tanggal 12 November 2016 pukul 09.26 WIB

pribadi dan interpersonal mahasiswa. Peran terkait program ini adalah program bermain dalam mengatur dan mempertahankan berbagai kesempatan belajar kepemimpinan kewirausahaan, menghubungkan siswa ke dunia bertualang kewirausahaan, dan memiliki pendekatan holistik untuk program kewirausahaan universitas.⁴⁰

4. Hasil penelitian Howard van Auken, yang berjudul: **Evaluating Entrepreneurship Development Programs: The Case Of The ILO And SIDA In Africa**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pasca-program yang meliputi peringkat pengetahuan, pemahaman dan kemampuan keterampilan cenderung lebih tinggi daripada pra-program. Analisis regresi logit menunjukkan bahwa bahasa dan struktur variabel program berhubungan positif dengan minat dalam memulai bisnis sedangkan bisnis Spanyol dan keterampilan kewirausahaan berhubungan negative dengan kepemilikan usaha.⁴¹
5. Hasil penelitian Maria Markatou, yang berjudul: **Incentives to Promote Entrepreneurship in Greece: Results Based on the 'New Innovative Entrepreneurship' Program**. Hasil penelitian

⁴⁰ Hasil penelitian Afsaneh Bagheri dan Zaidatul Akmaliah
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08832323.2011.638681> , diakses pada tanggal 22 Desember 2016 pukul 08.46 WIB

⁴¹ Hasil penelitian Howard van Auken
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08276331.1989.10600329?journalCode=rsbe20>, diakses pada tanggal 4 Januari 2017 pukul 10.46 WIB

menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha Yunani berniat untuk memperkenalkan produk baru atau yang meningkat secara signifikan atau layanan di pasar berdasarkan ide inovatif mereka, bertujuan untuk diversifikasi dan meningkatkan kualitas produk atau jasa. Namun tidak sedikit pengusaha Yunani yang memiliki sasaran utama yaitu peningkatan profitabilitas dan penguatan posisi kompetitif mereka di pasar.⁴²

E. Kriteria Evaluasi

Setiap program yang dirancang memiliki tujuan yang telah ditetapkan oleh pengambil keputusan. Tujuan program biasanya tertulis dalam sebuah keputusan dan pedoman pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Tujuan program menjadi tolak ukur keberhasilan program yang dijalankan. Tujuan program juga menjadi pijakan dan kriteria bagi evaluator untuk mengevaluasi sebuah program karena evaluasi sebuah program selalu berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.

Kriteria evaluasi Program Mahasiswa Wirausaha bersumber pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Kriteria evaluasi digunakan sebagai tolak ukur atas tahapan yang dilakukan berdasarkan konteks, masukan, proses dan produk.

⁴² Hasil penelitian Maria Markatou
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815036368>, diakses pada tanggal 4 Januari 2017 pukul 10.46 WIB

Konsep komponen, aspek dan kriteria evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian dalam perencanaan, proses implementasi, monitoring dan evaluasi serta hasil dari Program Mahasiswa Wirausaha. Untuk mempermudah proses evaluasi, maka dibuatlah struktur kriteria evaluasi Program Mahasiswa Wirausaha pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Kriteria Evaluasi Program Mahasiswa Wirausaha

Komponen Evaluasi	Aspek yang dievaluasi	Kriteria Keberhasilan
1. Konteks (<i>context</i>)	1.1. Latar Belakang PMW	1.1.1. Memiliki dokumen dasar hukum pelaksanaan PMW 1.1.2. Memiliki dokumen dasar hukum organisasi pelaksana PMW 1.1.3. Kesesuaian latar belakang PMW
	1.2. Tujuan PMW	1.2.1. Kesesuaian tujuan PMW
	1.3. Analisis Kebutuhan PMW	1.3.1. Rasionalisasi pelaksanaan PMW
2. Masukan (<i>Input</i>)	2.1. Sumber Daya Manusia	2.1.1. Memiliki struktur organisasi tim pelaksana PMW 2.1.2. Kesesuaian tugas pokok dan fungsi tim pelaksana PMW 2.1.3. Kesesuaian kriteria <i>reviewer</i> proposal PMW 2.1.4. Kesesuaian kriteria mentor PMW
	2.2. Sasaran PMW	2.3.1. Kesesuaian kriteria penerima modal usaha PMW

Komponen Evaluasi	Aspek yang dievaluasi	Kriteria Keberhasilan
	2.3. Sarana dan Prasarana Pendukung PMW	2.4.1. Memiliki ruang kegiatan, ruang pelayanan, computer, printer dan ATK
3. Proses (<i>Process</i>)	3.1. Persiapan PMW	3.1.1 Perencanaan PMW 3.1.2 Pelaksanaan sosialisasi PMW 3.1.3 Memiliki media informasi PMW 3.1.4 Pelaksanaan seleksi PMW
	3.2. Pembekalan PMW	3.2.1 Pelaksanaan pelatihan PMW 3.2.2 Pelaksanaan magang PMW
	3.3. Menjalankan Usaha PMW	3.3.1 Pencairan modal usaha PMW 3.3.2 Memiliki dokumen perjanjian kerja antara mahasiswa dengan pihak perguruan tinggi 3.3.3 Pelaksanaan pendampingan peserta PMW 3.3.4 Kesesuaian deskripsi peran mentor PMW
	3.4. Pemantauan dan Evaluasi PMW	3.4.1. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PMW
4. Hasil (<i>Product</i>)	4.1. Hasil PMW	4.1.1. Efektivitas PMW (Ketercapaian indikator keberhasilan)
	4.2. Pelaporan PMW	4.2.1. Pelaporan PMW

Kriteria evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar untuk masing masing aspek dan komponen diawali dari tahapan komponen yang

dievaluasi seperti *Context*, *Input*, *Process* dan *Product* dengan masing masing aspek dan kriteria yang akan dievaluasi;

1. Tahap *Context* (konteks) yang akan dievaluasi; latar belakang, tujuan dan analisis kebutuhan PMW. Dengan kriteria evaluasi; dokumen dasar hukum pelaksanaan dan organisasi pelaksana, kesesuaian latar belakang dan tujuan, kesesuaian penerima modal usaha, kebijakan Kemenristekdikti dan rasionalisasi pelaksanaan PMW.
2. Tahap *Input* (masukan) yang akan dievaluasi; sumber daya manusia, alokasi anggaran, sasaran, hingga sarana dan prasarana pendukung program. Dengan kriteria evaluasi; struktur serta kesesuaian tugas pokok dan fungsi tim pelaksana, kesesuaian alokasi anggaran, kesesuaian kriteria penerima modal usaha, ruang seminar, ruang pelayanan, komputer, printer, alat tulis kantor, petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PMW.
3. Tahap *Process* (proses) yang akan di evaluasi; persiapan, pembekalan, menjalankan usaha serta pemantauan dan evaluasi PMW. Dengan kriteria evaluasi; proses perencanaan, pelaksanaan sosialisasi, media informasi, pelaksanaan seleksi, kesesuaian kriteria *reviewer* proposal, pelaksanaan pelatihan, dokumen lembar evaluasi pelatihan, pelaksanaan magang,

pencairan modal usaha, dokumen perjanjian kerja antara mahasiswa dengan pihak perguruan tinggi, kesesuaian kriteria mentor, pelaksanaan pendampingan peserta, kesesuaian deskripsi peran mentor serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PMW.

4. Tahap *Product* (hasil) yang akan dievaluasi yaitu hasil program dan pelaporan PMW. Dengan kriteria evaluasi; efektivitas (ketercapaian indikator keberhasilan), pelaporan dan dokumen pelaporan PMW.

Dalam evaluasi Program Mahasiswa Wirausaha dilakukan penyebaran kuesioner sebagai alat ukur tingkat ketercapaian dan keterlaksanaan program berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditentukan. Untuk mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan PMW pada masing-masing aspek dan kriteria yang akan dievaluasi, maka digunakan indikator sebagai berikut; terlaksana 81% - 100% = Sangat Baik, terlaksana 61% - 80% = Baik, terlaksana 41% - 60% = Cukup, 21% - 40% = Kurang dan terlaksana $\leq 20\%$ = Sangat Kurang.